

**"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"**



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

BAWASLU KOTA DUMAI



Bawaslu Kota Dumai



Bawaslu_Dumai



Dumai.Bawaslu.go.id



Bawaslu_Dumai



Bawaslu Dumai

RINGKASAN EKSEKUTIVE

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Bawaslu Kota Dumai memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi Tahun 2022. Capaian kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut:

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	100%	100%
	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	8	8	100%
	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	-	-	-
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	104%	104%
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu	100%	100%	100%

	Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu			
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%	100%
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	0,2	0	0%
	Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	85%	93,80%	110,3%
	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja diatas, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dan terdapat tingkat efisiensi sebesar 7,94 atas penggunaan anggaran sebesar 93.05% dengan capaian output target kinerja sebesar 101%.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja instansi harus dibuat pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibuat dan disusun sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Bawaslu Kota Dumai telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai selaku Satuan Kerja selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kota Dumai tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan ini kami ucapkan terima kasih.

Dumai, Februari 2023

Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Dumai



IDRIS SARDI, SE

NIP. 19791128 201001 1 014

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi.....	2
1.3. Kedudukan , Tugas dan Fungsi.....	4
1.4. Isu Strategis.....	8
1.5. Sumber Daya Manusia	10
1.6. Sarana dan Prasarana	12
1.7. Keuangan	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Visi	14
2.2. Misi	14
2.3. Tujuan	15
2.4. Target Kinerja.....	15
2.5 Rencana Kinerja Tahunan	17
2.6 Rencana Anggaran Tahun 2022	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	21
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis.....	23
3.3. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan pada Bawaslu Kota Dumai.....	40
3.4 Realisasi Anggaran	42
3.5 Analisis Efisiensi	44
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	46
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu/Pemilihan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu/Pemilihan demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis. Melalui Pemilu/Pemilihan diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu RI untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kota Dumai.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Kota Dumai mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dari Bawaslu RI.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good government* dan merupakan sebuah pendekatan manajemen berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. Tiga pilar Good Governance antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai

program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi.

Laporan Kinerja digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A dan Kelas B. Sekretariat Bawaslu Kota Dumai diklasifikasikan sebagai Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B, terdiri atas:

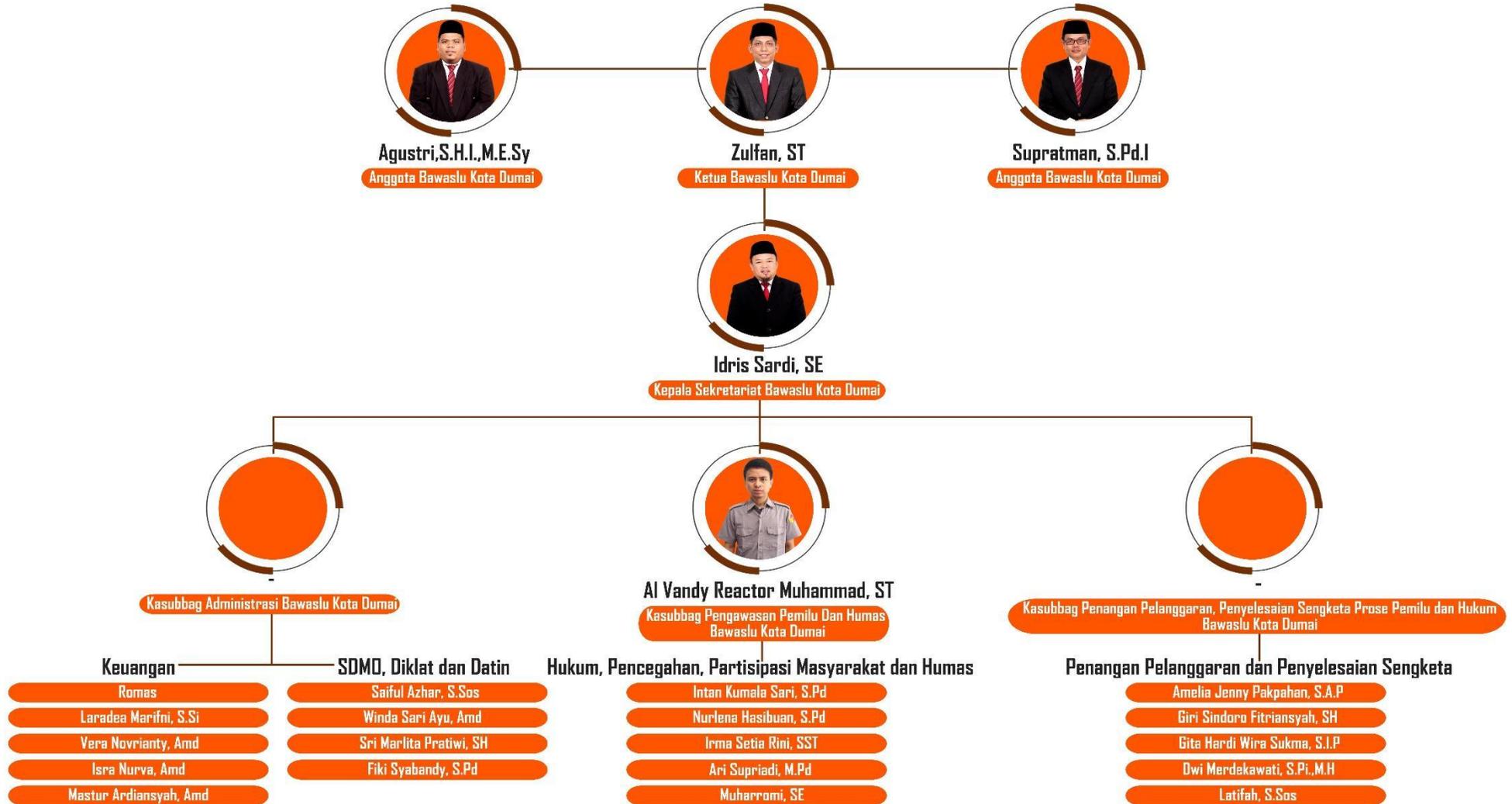
1. Subbagian Administrasi;
2. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum; dan
4. Kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Dumai mempunyai anggota sebanyak 3 (tiga) Anggota yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota yang terdiri dari:

1. Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
2. Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; dan
3. Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;

Adapun Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KOTA DUMAI



1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, kedudukan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut.

1.3.1 Kedudukan

Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai koordinator dan wakil koordinator divisi. Dalam hal Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sebagai koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Sekretariat Bawaslu Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.

1.3.2 Tugas dan Fungsi

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota mengoordinasikan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan berdasarkan divisi dan wilayah kerja. Adapun Tugas masing-masing Divisi pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;

- d. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
- e. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
- f. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g. pengolahan basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan
- h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- i. pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- j. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- k. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
- m. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
- n. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. penyusunan analisis dan kajian hukum;
 - b. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 - c. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - d. Pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - e. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
 - f. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
 - g. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - h. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - i. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf i;
 - j. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
 - k. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
 - l. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
 - m. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan; dan
 - n. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.

3. Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan;
- c. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- d. penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- e. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- f. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
- g. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- h. pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- i. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
- j. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- k. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- l. sosialisasi di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- m. pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
- n. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- o. pendokumentasian dan pengolahan basis data penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi;

- p. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; dan
- q. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

1. Subbagian Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
2. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota, pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber di kabupaten/kota, dan pengelolaan data informasi.
3. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, penyiapan bahan kajian hukum, advokasi hukum, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum di kabupaten/kota.

1.4 Isu Strategis

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, terdapat beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola Pemilu dan Pemilihan yang perlu dibenahi. Salah satu permasalahan paling menonjol pada Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara Pemilu yang sakit dan meninggal dunia. Desain keserentakan waktu Pemilu 2019 bagi penyelenggara Pemilu memberikan beban kerja yang

terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya. Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu Kota Dumai melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, antara lain:

1. Pendefinisian Kampanye dan Sosialisasi Perlu adanya regulasi yang mengatur batasan antara kampanye dan sosialisasi di sela waktu antara penetapan partai politik dan waktu kampanye;
2. Perubahan Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Terdapat beberapa putusan MK dan perubahan peraturan yang dilakukan pada saat tahapan sedang berlangsung sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
3. Aksesibilitas Terhadap Sistem Bawaslu Kota Dumai mendukung adanya program digitalisasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun pada pelaksanaannya Bawaslu Kota Dumai mengalami kendala dalam melakukan pengawasan terutama pada tahapan yang didukung dengan sistem karena adanya pembatasan terhadap akses data.
4. Perekrutan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu Pelaksanaan rekrutmen anggota Bawaslu Kota Dumai yang dilaksanakan pada saat tahapan Pemilu sedang berlangsung, waktu untuk melakukan bimbingan teknis yang bertepatan dengan waktu tahapan Pemilu, serta kendala pemenuhan beberapa persyaratan tes bagi penyelenggara ad hoc.
5. Penghapusan Tenaga Honorer Bawaslu Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, hal ini akan mengganggu proses pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu mengingat peran dan jumlah pegawai Bawaslu Kota Dumai sebagian besar merupakan tenaga honorer yang telah bekerja lama.
6. Terbatasnya Personil PNS di Bawaslu Kota Dumai. 3 PNS di Bawaslu yang ditugaskan dari pemerintah setempat dan jumlahnya jauh dari kata cukup. Selain tidak bisa fokus bekerja, banyak diantara mereka yang tidak paham dengan pola kerja di lembaga pengawas Pemilu karena sebelumnya mereka bertugas di instansi yang tidak ada kaitannya dengan kepemiluan, seperti rumah sakit, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian, dinas perhubungan, dinas kependudukan, dan lain-lain.

1.5 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pangkat dan Golongan Pegawai

Jabatan	Pangkat	Golongan	Jumlah
Komisioner	-	-	3 orang
Kepala Sekretariat	Penata	III/c	1 orang
Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Penata Muda Tk. I	III/b	1 orang
Kepala Subbagian Administrasi	-	-	-
Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu dan hukum	-	-	-
Jabatan Fungsional Umum	Penata Muda	III/a	4 orang
	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang
Staf PPNPN	-	-	14 orang
Tenaga Pendukung	-	-	4 Orang
Total			28 orang

Sumber data: Divisi SDM, Des 2022

Pada Tabel 1.1 Data Pangkat dan Golongan Pegawai terlihat bahwa staf Bawaslu Kota Dumai berjumlah 28 orang. Jabatan yang belum terisi ada 2 yaitu Kepala Subbagian Administrasi dan Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu dan hukum sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian tersebut tidak terlaksana dengan optimal.

Berikut adalah Profil Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Dumai



Profil

Nama : Zulfan, S.T
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 08 Juli 1982
Pendidikan : S1 Teknik Elektro
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Dumai
Divisi : Sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data dan informasi
Pengalaman Kepemiluan : - Anggota Panwaslu Kota Dumai Tahun 2017-2018
 - Anggota Bawaslu Kota Dumai 2018 s.d. 2023



Profil

Nama : Agusri, S.H.I., M.E.Sy
Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman, 28 Agustus 1983
Pendidikan : S2 Ekonomi Syariah
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Dumai
Divisi : Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat
Pengalaman : - Anggota PPK Tahun 2015
Kepemiluan : - Anggota Panwaslu Kota Dumai Tahun 2017-2018
- Anggota Bawaslu Kota Dumai 2018 s.d. 2023



Profil

Nama : Supratman, S.Pd.I
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Prapat, 12 Mei 1980
Pendidikan : S1 Tarbiyah
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Dumai
Divisi : Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa
Pengalaman : - Ketua KPPS Tahun 2015
Kepemiluan : - Anggota Panwaslu Kota Dumai Tahun 2017-2018
- Anggota Bawaslu Kota Dumai 2018 s.d. 2023



Profil

Nama : Idris Sardi, S.E
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 28 November 1979
Pendidikan : S1 Ekonomi
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Dumai
NIP : 197911282010011014
Pengalaman : - Bendahara di Sekretariat PPS Kelurahan Lubuk Gaung Tahun 2014
Kepemiluan : - Kepala Sekretariat PPS di Kelurahan Tanjung Penyembal Tahun 2017 s.d. 2018
- Koordinator Sekretariat di Bawaslu Kota Dumai Tahun 2019 s.d. 2020
- Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020 s.d. Sekarang

1.6 Sarana dan Prasarana

Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Bawaslu Kota Dumai

Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi	Status
Kendaraan Roda Empat	2	Buah	Baik	Sewa
Transportable Generating Set	1	Unit	Baik	Tetap
Camera Digital	2	Buah	Baik	Tetap
Termometer Mercury untuk suhu	1	Buah	Baik	Tetap
P.C Unit	15	Buah	Baik	Tetap
Laptop	9	Buah	Baik	Tetap
Printer	18	Buah	Baik	Tetap
Lemari Besi/Metal	3	Buah	Baik	Tetap
Scanner	1	Buah	Baik	Tetap
Lemari Kayu	6	Buah	Baik	Tetap
Brandkas	1	Buah	Baik	Tetap
Tabung Pemadam Api	1	Buah	Baik	Tetap
CCTV	1	Buah	Baik	Tetap
Mesin Absensi	1	Buah	Baik	Tetap
LCD Projector	1	Buah	Baik	Tetap
Alat Perekam Suara	1	Buah	Baik	Tetap
Focusing Screen	1	Buah	Baik	Tetap
Meja Kerja Kayu	27	Buah	Baik	Tetap
Sice	4	Buah	Baik	Tetap
Kursi Fiber Glas/Plastik	15	Buah	Baik	Tetap
A.C Window	1	Buah	Baik	Tetap
A.C Split	7	Buah	Baik	Tetap
Televisi	1	Buah	Baik	Tetap
Sound System	1	Buah	Baik	Tetap
Mic Conference	1	Buah	Baik	Tetap
Handy Cam	1	Buah	Baik	Tetap
Alat Tennis Meja	1	Buah	Baik	Tetap

Sumber Data : BMN, Des 2022

1.7 Keuangan

Dalam rangka mendukung kelancaran Tugas Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022. Bawaslu Kota Dumai didukung dengan Anggaran APBN untuk melaksanakan kegiatan dan operasional kantor dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Bawaslu Kota Dumai realisasi besaran serapan Anggaran APBN tahun 2022 dengan DIPA sebesar Rp3.695.840.000 dengan serapan anggaran Rp3.439.775.823 atau 93.07% yang sudah terserap.

Tabel 1.3 Realisasi Anggaran Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Capaian	Keterangan
1	Anggaran Bawaslu Kota Dumai	Rp1,673,326,000	Rp1,523,594,499	91.05%	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
		Rp2,022,514,000	Rp1,916,181,324	94,74%	Program Dukungan Manajemen
Total		3,695,840,000	3,439,775,823	93,07%	

Sumber data: Aplikasi Sakti

Berdasarkan Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022, Realisasi Program dan Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi program, yang mencakup program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi selama satu tahun periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 di Badan Pengawas Pemilu Kota Dumai dengan Realisasi Anggaran APBN di Bawaslu Kota Dumai pada TA 2022 sebesar Rp1,523,594,499 dari alokasi anggaran sebesar Rp1,673,326,000,-. Kemudian mencakup program dukungan manajemen selama Satu Tahun periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 di Badan Pengawas Pemilu Kota Dumai dengan Realisasi Anggaran APBN di Bawaslu Kota Dumai pada TA 2022 sebesar Rp1,916,181,324 dari alokasi anggaran sebesar Rp2,022,514,000,-.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi

Visi Bawaslu yaitu **“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.”** Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Bawaslu, terdapat 5 (lima) Misi Bawaslu, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparat Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: **“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”**

2.3 Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Adapun untuk

mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Untuk dapat mengukur sasaran kegiatan, selain ditentukan oleh indikator pencapaian juga ditetapkan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target Bawaslu Kota Dumai merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai Bawaslu Kota Dumai dari setiap indikator kerjanya yang ditentukan di awal tahun perencanaan.

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Bawaslu disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Target Kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Satuan
			2021	2022	2023	2024	
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri		100	100	100	%
		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		8	8	8	Daerah
		Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	0	0	1	Daerah

		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota		100	100	100	%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	0,1	0,2	0,3	0,4	Skala
		Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%
		Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	%

Sumber: Renstra Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020-2024

2.5 Rencana Kinerja Tahunan

Berdasarkan dengan Surat Kementerian Keuangan RI No. S-889/AG.5/2021 Hal Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2022 dan Surat dari Bawaslu RI No. 3678/PR.01.01/SJ/12/2021 Hal Penyampaian Satuan Kerja Baru di 18 Kabupaten/Kota, Bawaslu Kota Dumai resmi menjadi Satuan Kerja baru Lingkungan Bawaslu pada tanggal 24 Desember 2021. Oleh karena itu Bawaslu Kota Dumai belum menyusun Perjanjian Kinerja Ketua dan Kasek pada tahun 2022, sehingga pengukuran kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah Bawaslu Kota Dumai merupakan pengukuran terhadap target kinerja tahun 2022 pada RENSTRA Bawaslu Kota Dumai, sebagai Berikut:

Tabel 2.2 Target Kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Satuan
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	%
		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	8	Daerah
		Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	0	Daerah
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	%
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota	100	%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	%

		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	%
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	0,2	Skala
		Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	85	%
		Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100	%

Sumber: Renstra Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020-2024

2.6 Rencana Anggaran Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai. Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kota Dumai melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang 3 hal berikut, dan di paparkan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.
3. Rencana Akun Belanja yang akan direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun

Tabel 2.3 Rencana Akun Belanja tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu
1	Belanja Pegawai (51)	Rp 770.037.000
2	Belanja Barang (52)	Rp 2.919.303.000
3	Belanja Modal (53)	Rp 6.500.000
Total		Rp 3.695.840.000

Tabel 2.3 Rencana Program/Kegiatan Tahun 2022

No	Deskripsi	Program/Kegiatan	Besaran Anggaran
1	Anggaran Bawaslu Kota Dumai	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp1,673,326,000
		Program Dukungan Manajemen	Rp2,022,514,000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja dalam organisasi, merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Bawaslu Kota Dumai tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja. Berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

a. Capaian Target Indikator Kinerja

Bawaslu Kota Dumai telah melaksanakan penilaian kinerja mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Kota Dumai dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Sedangkan untuk pengukuran persentase capaian kinerja dihitung menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	100%	100%
	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	8	8	100%
	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	-	-	-
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	104%	104%
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%	100%

Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	0,2	0	0%
	Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	85%	93,80%	110,3%
	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

b. Penghargaan atas Capaian Kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022

Pada tahun 2022 Bawaslu Kota Dumai memperoleh penghargaan sebagai sebagai satuan kerja baru terbaik dari KPPN Dumai.



3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran kegiatan yang menjadi target Bawaslu Kota Dumai guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan pada Bawaslu Kota Dumai dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran kegiatan yang diformulasikan dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja, yang dapat diukur sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

- a. **Indikator 1 Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS.**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target dan Capaian Indikator 1

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
100%	100%	101%	101%	100%

Dalam mengukur capaian indikator “Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa Bawaslu Kota Dumai didasarkan pada Persentase capaian Renja Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Persentase Capaian Renja Tahun 2022

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Volume / Target		Realisasi		Capaian Output	
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
1	2	4	5	6	7	8	
115.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc						
BAH	Pelayanan Publik Lainnya						
	051	Koordinasi penanganan pelanggaran	1	Laporan	1	laporan	100
	052	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	1	laporan	100
BKC	Pemantauan Lembaga						
	051	Pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	1	laporan	100

	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	laporan	100
	053	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan	0		
	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan	1	laporan	100
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	1	laporan	100
6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu						
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc						
	053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	1	Daerah	1	Daerah	100
	054	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan	36	Daerah	36	Daerah	100
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota						
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Laporan	1	laporan	100
	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	1	Laporan	1	Laporan	100
	053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	1	Laporan	1	Laporan	100
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	1	Laporan	100
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	1	Laporan	1	Laporan	100
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	1	Laporan	1	Laporan	100
	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	1	Laporan	1	laporan	100
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan						
	58	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Kabupaten/Kota	1	Unit	1	Unit	100
6662	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu						
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						
	051	Publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	1	Laporan	100
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	1	Laporan	100
	053	Penanganan	1	Laporan	1	Laporan	100

		pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu					
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan	1	Laporan	100
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	1	Laporan	100
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc						
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga						
004	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota						
	401	Honorarium panwaslu kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	100
	402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair	1	Laporan	1	Laporan	100
	404	Pelayanan administrasi perkantoran	1	Laporan	1	Laporan	100
115.WA	Program Dukungan Manajemen						
956	Layanan BMN						
	052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	2	Laporan	3	Laporan	150
957	Layanan Hukum						
	053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	100
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi						
	052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	100
963	Layanan Data dan Informasi						
	052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	100
994	Layanan Perkantoran						
	001	Gaji dan tunjangan	1	Laporan	1	Laporan	100
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	1	Laporan	1	Laporan	100
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
	052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	28	Orang	28	Orang	100
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran						
	052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100

953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi						
	052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100
955	Layanan Manajemen Keuangan						
	052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100
961	Layanan Reformasi Kinerja						
	052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan						
	052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100
Jumlah			99		100		101

Berdasarkan data diatas, bahwa capaian atas penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa Bawaslu Kota Dumai tahun 2022 adalah 101%.

Capaian indikator penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa meningkat sebesar 101% dari tahun 2021 Hal ini disebabkan Bawaslu Kota Dumai baru menjadi satker sejak Tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja baru dilakukan atas target Tahun 2022.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator 1 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
101%	-	101%

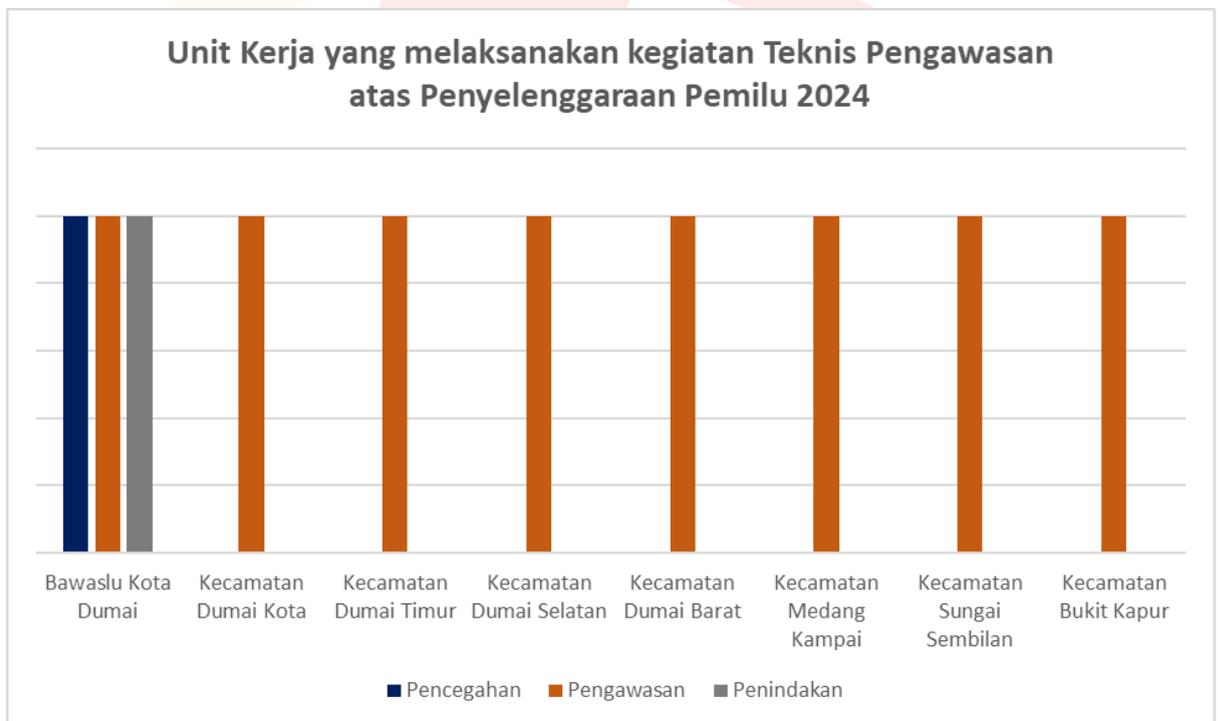
b. Indikator 2 Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi

Capaian indikator kinerja Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Target dan Capaian Indikator 2

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
8	8	8	100%	100%

Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada dihitung berdasarkan jumlah unit kerja Kabupaten dan kecamatan yang menyelenggarakan pengawasan pada wilayah kerja Bawaslu Kota Dumai dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut:



Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 100% dari tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator 2 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
100%	-	100%

Kenaikan ini terjadi secara signifikan dikarenakan target Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada merupakan target kinerja yang baru ada pada Tahun 2022 sehingga capaian tahun 2021 adalah 0%.

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu yang dilaksanakan pada Bawaslu Kota Dumai meliputi fungsi Pencegahan, Pengawasan Tahapan dan Penindakan sesuai dengan fungsi Bawaslu pada Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan hasil kegiatan pengawasan Tahun 2022 sebagai berikut:

a) Pencegahan

Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2022 telah melaksanakan upaya pencegahan melalui pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemilu kepada organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, MoU dengan Perguruan tinggi serta pemberian surat himbauan kepada KPU dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kegiatan Pencegahan Bawaslu Kota Dumai

No	Kegiatan Pencegahan	Output	Sasaran
1	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	1. Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan 7 Perguruan Tinggi dan 15 Organisasi Masyarakat/Kemahasiswaan 2. Nota Kesepahaman Bersama "Gerakan Seribu Relawan Pengawas Pemilu"	Organisasi masyarakat/kemahasiswaan dan perguruan tinggi
2	Sosialisasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	5 Produk Hukum	Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan se-Kota Dumai
3	Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi Pemilih Pemula dan Mahasiswa	Pemahaman terhadap pentingnya pemilih dalam pemilu, penggunaan hak dan kewajiban yang dimiliki, larangan dalam pemilu serta ciri pemimpin yang layak dipilih.	Pelajar dan Mahasiswa di Lingkungan Kota Dumai

4	Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi Ormas, Penyandang Disabilitas, Tokoh Masyarakat	Pemahaman terhadap pentingnya pengawasan dalam pemilu, penggunaan hak dan kewajiban yang dimiliki, larangan dalam pemilu	Organisasi Masyarakat, Penyandang Disabilitas dan Tokoh Masyarakat
5	Sosialisasi di Lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Dumai terkait Netralitas ASN	Pakta Integritas Netralitas Aparatur Sipil Negara	ASN di Lingkungan Kementerian Agama Kota Dumai
6	Surat Himbauan	7 Surat Himbauan	KPU dan Partai Politik Peserta Pemilu

b) Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024

Sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, Bawaslu Kota Dumai melakukan pengawasan secara melekat atas penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kota Dumai pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik atas Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Kegiatan Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022

No	Kegiatan Pengawasan	Sasaran	Hasil Pengawasan
1	Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	KPU	Terdapat 40 partai politik yang mendaftar di KPU RI, dan hanya 24 Partai Politik yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke Tahapan Verifikasi Administrasi di KPU Kota Dumai
2	Verifikasi Administrasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	KPU Kota Dumai	Terdapat indikasi NIK (samar), perbedaan tanggal lahir antara KTP dan KTA, serta ada status pekerjaan masih PNS, POLRI dan TNI. Dalam pengawasan verifikasi administrasi tersebut ada beberapa masyarakat yang melapor ke Bawaslu Kota Dumai terkait pencatutan nama yang bersangkutan di SIPOL dan Bawaslu Kota Dumai telah mengirimkan surat saran perbaikan ke KPU Kota Dumai terkait laporan/tanggapan masyarakat yang tercatat di SIPOL
3	Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	KPU Kota Dumai dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024	Terdapat beberapa anggota yang ditemui, tidak mengakui bahwa yang bersangkutan sebagai anggota partai politik dan mengisi formulir yang disediakan oleh KPU Kota Dumai. Selain itu terdapat anggota yang ditemui tetapi

			<p>tidak mengakui bahwa yang bersangkutan sebagai anggota partai politik dan tidak bersedia mengisi formulir yang disediakan oleh KPU Kota Dumai. Untuk anggota partai politik yang tidak dapat ditemui secara langsung, maka pengurus partai politik melakukan panggilan <i>videocall</i> dan Bawaslu Kota Dumai melakukan pengawasan secara melekat untuk memastikan kebenaran identitasnya (KTP dan KTA) serta pengakuan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota partai politik atau tidak.</p> <p>Pada verifikasi faktual perbaikan terdapat 3 partai politik yang harus melaksanakan tahapan tersebut dikarenakan jumlah anggota yang memenuhi syarat belum tercapai.</p>
4	Pengawasan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)	Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024	Data Alamat kantor, Logo, Rekening, kepengurusan dan keanggotaan 24 partai politik tersebut sesuai dengan saat pendaftaran. Selain itu juga mengawasi data verifikasi administrasi dan verifikasi faktual namun terjadi pembatasan elemen data yang ada pada akun SIPOL milik Bawaslu sehingga perbandingan data antara pengawasan verifikasi administrasi melekat di Kantor KPU maupun verifikasi faktual di rumah kepengurusan dan keanggotaan parpol sedikit berbeda.
5	Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi (Uji Publik)	KPU Kota Dumai	Terdapat 5 Tanggapan Masyarakat yang terdapat pada <i>helpdesk</i> KPU yang terdiri dari pimpinan cabang partai demokrasi indonesia perjuangan, pimpinan cabang partai demokrasi indonesia perjuangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Masyarakat Kota Dumai, dan Pimpinan Partai Demokrat Kota Dumai.
6.	Pengawasan Rekrutmen PPK	KPU Kota Dumai	Pada tahapan pengumuman, pendaftaran, penelitian berkas, tes tertulis, pengumuman hasil tertulis, wawancara, pengumuman lulus tes wawancara dan pelantikan sesuai dengan peraturan. Namun pada saat tahapan seleksi administrasi, Bawaslu Kota Dumai melakukan analisis terhadap nama-nama calon PPK yang lulus seleksi administrasi tersebut dan terdapat 2 (dua) nama calon yang terindikasi terlibat partai politik pada pemilu tahun 2019. Dalam hal, yang bersangkutan tidak lulus

			tes tertulis sehingga tidak ditemukan pelanggaran.
--	--	--	--

c) Penindakan

Penindakan diselenggarakan melalui 2 fungsi Bawaslu yaitu fasilitasi penyelesaian sengketa proses pemilu dan fungsi fasilitasi penanganan pelanggaran pemilu. Selama Tahun 2022 tidak terdapat permohonan sengketa proses pemilu sehingga tidak terdapat aktivitas mediasi sengketa maupun sidang ajudikasi sengketa proses pemilu. Dalam rangka mencegah tingginya permohonan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kota Dumai melakukan upaya pencegahan melalui pemberian surat himbauan ke KPU dan Partai Peserta Pemilu.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi penanganan pelanggaran, Bawaslu Kota Dumai tidak menerima adanya laporan maupun temuan terkait pelanggaran proses pemilu sehingga dalam rangka mencegah tingginya laporan dan temuan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kota Dumai melakukan upaya pencegahan melalui pemberian surat himbauan ke KPU dan Partai Peserta Pemilu.

c. Indikator 3 Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting

Capaian indikator kinerja Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Target dan Capaian Indikator 3

Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
1	0	1	0	0%	100%

Pada Tahun 2024, dalam rangka pemenuhan target Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting Bawaslu Kota Dumai tidak menganggarkan kegiatan SKPP pada DIPA Sekretariat Bawaslu Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dikarenakan tidak adanya target SKPP untuk Tahun 2022. Dan SKPP telah dilaksanakan di Lingkungan Bawaslu Kota Dumai pada Tahun 2021 sehingga pemenuhan target jangka menengah telah terpenuhi 100%.

d. Indikator 4 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Target dan Capaian Indikator 3

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
100%	100%	104%	104%	100%

Pengukuran terhadap indikator kinerja Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dalam rangka pelayanan administrasi atas pelaksanaan kegiatan pada Bawaslu Kota Dumai sebagai berikut:

Tabel 3.11 Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Bawaslu Kota Dumai

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan (%)
1	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	150
2	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	100
3	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	100
4	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	100
5	Gaji dan tunjangan	100
6	Operasional dan pemeliharaan kantor	100
7	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	100
8	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	100
9	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	100
10	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	100
11	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100
12	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu	100

	Kabupaten/Kota	
	Total	104%

Sumber Data: Realisasi Kegiatan Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dalam rangka pemberian layanan administrasi kepada Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022 tercapai 104% dengan pemenuhan terhadap target Tahun 2024 sebesar 100%.

Capaian indikator Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya meningkat sebesar 104% dari tahun 2021 Hal ini disebabkan Bawaslu Kota Dumai baru menjadi satker sejak Tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja baru dilakukan atas target Tahun 2022.

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Indikator 4 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
104%	-	104%

e. Indikator 5 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota pada Bawaslu Kota Dumai regulasi pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Target dan Capaian Indikator 5

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
100%	100%	100%	100%	100%

Capaian ini mengalami peningkatan/Penurunan dari tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator 5 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
100%	-	100%

Pengukuran terhadap indikator Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi pada Bawaslu Kota Dumai sebagai berikut:

Tabel 3.15 Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada Bawaslu Kota Dumai

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan (%)
1	Koordinasi penanganan pelanggaran	100
2	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	100
3	Pengawasan pemilu partisipatif	100
4	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	100
5	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	100
6	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	100
7	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	100
8	Rekrutmen panwaslu kecamatan	100
9	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan	100
10	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	100
11	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	100
12	Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu	100
13	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	100
14	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	100
15	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	100
16	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	100
17	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota	100
18	Publikasi dan dokumentasi	100
19	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	100
20	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	100
21	Fasilitasi sentra gakkumdu	100
22	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	100
23	Honorarium panwaslu kecamatan	100
24	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair	100
25	Pelayanan administrasi perkantoran	100
Total		100%

Sumber: Realisasi Kegiatan Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota pada Bawaslu Kota

Dumai tercapai 100% dengan pemenuhan terhadap target Tahun 2024 sebesar 100%.

Kenaikan/penurunan atas capaian indikator penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota terhadap Tahun 2021 Hal ini disebabkan Bawaslu Kota Dumai baru menjadi satker sejak Tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja baru dilakukan atas target Tahun 2022.

f. Indikator 6 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Target dan Capaian Indikator 6

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
100%	100%	100%	100%	100%

Dalam mengukur capaian indikator Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kota Dumai (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) adalah dengan menghitung jumlah bulan (realisasi) Pembayaran gaji dan operasional kantor terhadap jumlah bulan yang dianggarkan untuk gaji dan operasional kantor dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah bulan Pembayaran}}{\text{Jumlah Bulan Anggaran}} \times 100\%$$

$$\frac{14 \text{ bulan}}{14 \text{ bulan}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2022 adalah 100%.

Capaian ini tidak mengalami peningkatan/Penurunan dari tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Indikator 6 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
100%	100%	0%

g. Indikator 7 Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan

Capaian indikator kinerja Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Target dan Capaian Indikator 7

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
100%	100%	100%	100%	100%

Dalam mengukur capaian indikator Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota adalah dengan menghitung jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan dan jumlah pengadaan sarpras yang dianggarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan sarpras}}{\text{Jumlah pengadaan sarpras yang dianggarkan}} \times 100\%$$

$$\frac{1 \text{ unit}}{1 \text{ unit}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2022 adalah 100%.

Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator 7 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
--------------	--------------	----------------------

100%	-	100%
------	---	------

Capaian indikator Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2022 meningkat sebesar 100% dari tahun 2021 Hal ini disebabkan Bawaslu Kota Dumai baru menjadi satker sejak Tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja baru dilakukan atas target Tahun 2022.

Sasaran Kegiatan 2
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset

a. Indikator 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Target dan Capaian Indikator 1

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
0,2	0,4	-	-	100%

Pada tahun 2022 indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset di Bawaslu Kota Dumai belum tercapai, karena belum dilakukan survey kepuasan pelayanan administrasi keuangan dan aset terhadap pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu Kota Dumai.

b. Indikator 2 Persentase nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)

Capaian indikator kinerja Persentase nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada Bawaslu Kota Dumai sebagai berikut:

Tabel 3.21 Target dan Capaian Indikator 2

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
85%	90%	93,80%	110,3%	100%

Adapun rincian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut

Gambar 3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	120	115	686501	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA DUMAI	Nilai	100.00	90.41	82.62	0.00	0.00	94.73	100.00	100.00	75.04	80%	93.80
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.04	16.52	0.00	0.00	9.47	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	95.21				92.45			100.00			

Sumber data: *Span*

Capaian ini mengalami peningkatan/Penurunan dari tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Indikator 2 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
110,3%	-	110,3%

Adapun Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Bawaslu Kota Dumai untuk TA 2022 mencapai 93,80%. Nilai ini melebihi dari target capaian yang ditentukan sebesar 85%. Kenaikan ini terjadi secara signifikan dikarenakan tidak terdapatnya nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2021 yang mana pada tahun tersebut DIPA Bawaslu Kota Dumai masih menginduk pada DIPA Bawaslu Provinsi Riau.

c. Indikator 3 Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu

Capaian indikator kinerja Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23 Target dan Capaian Indikator 3

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
100%	100%	100%	100%	100%

Dalam mengukur capaian indikator Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu adalah dengan menghitung jumlah jumlah laporan

keuangan tahunan dan LBMN yang dihasilkan terhadap jumlah laporan keuangan tahunan dan LBMN yang dilaporkan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan Tahunan dan LBMN yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Laporan Keuangan Tahunan dan LBMN yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$\frac{2 \text{ Laporan}}{2 \text{ Laporan}} \times 100\%$$

Dengan demikian, Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu di Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2022 adalah 100%.

Capaian indikator Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu pada Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2022 meningkat sebesar 100% dari tahun 2021 Hal ini disebabkan Bawaslu Kota Dumai baru menjadi satker sejak Tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja baru dilakukan atas target Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Indikator 3 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
100%	-	100%

3.3 Hambatan Pelaksanaan Kegiatan pada Bawaslu Kota Dumai

Dalam pelaksanaan program kegiatan Bawaslu Kota Dumai pada Tahun 2022, menemui kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut:

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang.
 Pada saat melaksanakan tugas pengawasan Bawaslu Kota Dumai masih kekurangan jumlah SDM mengingat banyaknya kecamatan serta kelurahan yang

terdapat di Kota Dumai dan Bawaslu Kota Dumai dituntut untuk melakukan penyebaran SDM pada saat pengawasan agar maksimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan.

b. Komunikasi antara Bawaslu Kota Dumai dengan KPU Kota Dumai

Komunikasi antara Bawaslu Kota Dumai dan KPU Kota Dumai perlu diharmonisasikan agar pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan yang diselenggarakan oleh kedua penyelenggara berjalan dengan baik dan optimal

c. Data yang diperoleh terbatas

Pada saat Bawaslu Kota Dumai akan melaksanakan pengawasan, hambatan yang sering ditemui adalah kurangnya data yang diperoleh. Hal ini menyebabkan tim pengawasan tidak dapat membandingkan data yang dimiliki oleh KPU Kota Dumai

d. Sarana dan Prasarana belum memadai

Sarana dan prasarana yang masih belum maksimal contoh masih banyak peralatan yang belum memadai untuk menunjang pekerjaan, seperti komputer yang lambat, jumlah printer yang kurang mencukupi, sehingga hal ini sering menghambat pekerjaan

e. Kondisi Geografis yang sulit dijangkau

Dalam pelaksanaan pengawasan, hambatan yang kerap ditemui yaitu kondisi geografis di beberapa daerah Kota Dumai yang masih sulit dijangkau. Terdapat daerah di beberapa kelurahan yang hanya dapat dijangkau oleh kendaraan khusus, contohnya seperti kelurahan Batu Teritip yang harus ditempuh menggunakan *speed boat* untuk menyebrangi sungai

f. Terbatasnya izin akses terhadap SIPOL dan SILON

Hambatan yang dialami Bawaslu Kota Dumai selanjutnya adalah terbatasnya akses yang dimiliki pada website SIPOL dan SILON. Adanya keterbatasan ini menyebabkan terhambatnya tugas pengawasan dalam mengkaji identitas anggota Partai Politik dan pendukung Bakal Calon Anggota DPD

g. Masa transisi pada pengusulan anggaran

Bawaslu Kota Dumai masih berada pada tahap transisi sehingga harus menyesuaikan diri dengan sistem yang berlaku untuk satuan kerja, hal ini juga berpengaruh kepada perencanaan kegiatan yang masih belum optimal. Selain itu Bawaslu Kota Dumai sebagai pelaksana atas penganggaran yang ditetapkan dari tingkat Provinsi dan Pusat menyebabkan seringnya kegiatan yang teranggarkan belum sesuai untuk memenuhi kegiatan riil yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi wilayah kerja pada Bawaslu Kota Dumai.

h. Kualifikasi pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai

Kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh SDM Bawaslu Kota Dumai belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya seperti bidang hukum, yang seharusnya membutuhkan SDM dengan *basic* pendidikan hukum. Pada bidang kehumasan, diperlukan tamatan ilmu komunikasi ataupun humaniora

Dan atas beberapa hambatan tersebut telah dapat dilakukan pemecahan masalah pada tahun pelaksanaan anggaran meskipun belum seluruhnya optimal yaitu melalui:

- a. Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan kegiatan pada Bawaslu Kota Dumai
- b. Peningkatan kapasitas SDM
- c. Bersurat ke KPU setempat untuk memperoleh data dari SIPOL dan SILON serta data-data lain yang diperlukan
- d. Bekerjasama dengan KPU dalam rangka melakukan pengawasan sehingga pembebanan biaya dalam rangka pengawasan melekat dapat ditanggulangi bersama-sama

3.4 Realisasi Anggaran

Capaian realiasi anggaran Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebesar 93,07%. Berdasarkan pemenuhan kebutuhan anggaran dalam pencapaian program kegiatan Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022 dapat dijabarkan pada Tabel dibawah:

**Tabel 3.25 Target dan Realisasi Anggaran Per-Kegiatan
Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022**

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	86,112,000	73,387,000	85.22%
		Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	749,149,000	667,600,599	89.11%
		Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	465,510,000	448,607,282	96,37%

		Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	372,555,000.00	333,999,618.00	89.65%
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	2,022,514,000	1,916,181,324	94.74%
Total			Rp3.695.840.000,00	Rp3.439.775.823,00	93,07%

Pada Tabel Target dan Realisasi Anggaran Per-Kegiatan Bawaslu Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat bahwa capaian dari 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen telah didukung dengan anggaran yang memadai dan direalisasikan sebesar 93,07%. Hal tersebut membuktikan bahwa Bawaslu Kota Dumai dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang kedua program tersebut dan merealisasikan anggaran dengan baik. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Dumai akan mempertahankan dan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya. Perbandingan Realisasi Anggaran Bawaslu Kota Dumai tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.26 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

No	Kegiatan	2021	2022	Kenaikan/Penurunan
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	97,33%	85.22%	-12,11%
2	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	-	89.11%	89.11%
3	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	-	96.37%	96.37%
4	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	-	89.65%	89.65%
5	Dukungan Manajemen Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	85,54%	94.74%	9,20%
Total		91,44%	93,07%	1,63%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran Bawaslu Kota Dumai pada Tahun 2022 meningkat dari Tahun 2021 sebesar 1,63% Terdapat 3 kegiatan baru dalam rangka mendukung program Konsolidasi Demokrasi pada Tahun 2022 yang merupakan kegiatan Tambahan Prioritas Nasional dalam Rangka Pengawasan

Tahapan Pemilu Tahun 2024. Selanjutnya realisasi belanja pada Bawaslu Kota Dumai berdasarkan kodefikasi akun belanja pada Tahun 2022 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Relisasi Anggaran Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai (51)	Rp 770.037.000	Rp 743.610.587	96,57%
2	Belanja Barang (52)	Rp 2.919.303.000	Rp 2.690.015.236	92,15%
3	Belanja Modal (53)	Rp 6.500.000	Rp 6.150.000	94,62%
Total		Rp 3.695.840.000	Rp 3.439.775.283	93,07%

3.5 Analisis Efisiensi

Pada Tahun 2022, Bawaslu Kota Dumai telah berupaya meningkatkan efisiensi hampir pada seluruh kegiatan dan komponen kegiatan. Hal ini terlihat bahwa tingkat capaian realisasi pemenuhan output kinerja terhadap renja lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran tahun 2022 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 97,03 dan capaian realisasi output kinerja sebesar 101% dengan tingkat efisiensi secara keseluruhan sebesar 7,94% dengan uraian terperinci sebagai berikut:

Tabel 3.28 Analisis Efisiensi

Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Capaian Realisasi anggaran	Capaian Output	Tingkat Efisiensi
1		2	3	4
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc				
Pelayanan Publik Lainnya				
051	Koordinasi penanganan pelanggaran	99,04%	100,00%	0,96%
052	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	85,02%	100,00%	14,98%
Pemantauan Lembaga				
051	Pengawasan pemilu partisipatif	80,57%	100,00%	19,43%

052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	95,55%	100,00%	4,45%
053	Evaluasi pelaksanaan pengawasan			
054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	47,73%	100,00%	52,27%
055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	92,17%	100,00%	7,83%
Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu				
Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc				
053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	94,69%	100,00%	5,31%
054	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan	0	100,00%	100,00%
Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota				
051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	92,89%	100,00%	7,11%
052	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	99,39%	100,00%	0,61%
053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	88,45%	100,00%	11,55%
054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	92,16%	100,00%	7,84%
055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	0,00%	100,00%	100,00%
056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	56,16%	100,00%	43,84%
057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	99,82%	100,00%	0,18%
Sistem Informasi Pemerintahan				
58	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Kabupaten/Kota	74,28%	100,00%	25,72%
Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu				
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				
051	Publikasi dan dokumentasi	98,61%	100,00%	1,39%
052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	96,18%	100,00%	3,82%
053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	40,87%	100,00%	59,13%
054	Fasilitasi sentra gakkumdu	97,49%	100,00%	2,51%
055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	80,00%	100,00%	20,00%
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC				
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				
Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota				
401	Honorarium panwaslu kecamatan	100,00%	100,00%	0,00%
402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair	95,47%	100,00%	4,53%
404	Pelayanan administrasi perkantoran	61,23%	100,00%	38,77%
Program Dukungan Manajemen				
Layanan BMN				
052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	81,81%	150,00%	68,19%
Layanan Hukum				

053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	91,36%	100,00%	8,64%
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				
052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	92,23%	100,00%	7,77%
Layanan Data dan Informasi				
052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	80,72%	100,00%	19,28%
Layanan Perkantoran				
001	Gaji dan tunjangan	96,57%	100,00%	3,43%
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	93,77%	100,00%	6,23%
Layanan Manajemen SDM Internal				
052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	95,19%	100,00%	4,81%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran				
052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	72,68%	100,00%	27,32%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi				
052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	86,26%	100,00%	13,74%
Layanan Manajemen Keuangan				
052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	95,17%	100,00%	4,83%
Layanan Reformasi Kinerja				
052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	0,00%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan				
052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	99,93%	100,00%	0,07%
		93,07%	101,01%	7,94%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kota Dumai dan jajaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 71,43%. Dalam pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, 8 (delapan) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik, sementara 1 sasaran kegiatan yaitu Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan dan aset belum tercapai, karena belum dilakukan survey kepuasan pelayanan administrasi keuangan dan aset terhadap pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu Kota Dumai. Sementara itu, juga terdapat 1 sasaran kegiatan yang tidak dianggarkan pada DIPA Sekretariat Bawaslu Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dikarenakan telah dilaksanakan di Lingkungan Bawaslu Kota Dumai pada Tahun 2021 sehingga pemenuhan target jangka menengah telah terpenuhi 100%.

Dalam hal capaian realisasi keuangan, Bawaslu Kota Dumai juga berhasil melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022 secara efektif dan efisien, dengan capaian sebesar 93,07%. Bawaslu Kota Dumai tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerja dan akan memperbaiki kekurangan yang terjadi pada tahun ini. Tentunya selama tahun 2022 juga terdapat beberapa permasalahan seperti keterbatasan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana penunjang, serta struktur organisasi. Semua ini perlu peningkatan dalam rangka memperkuat kelembagaan Pengawas Pemilu kedepan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Pada tahun 2023, Bawaslu Kota Dumai akan memfokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan Bawaslu Kota Dumai dengan prioritas kegiatan:

1. Penguatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Dumai
2. Pemantapan dukungan kesekretariatan Bawaslu Kota Dumai untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu Kota Dumai;
3. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Bawaslu Kota Dumai;
4. Pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
5. Pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.